

**TRANSPARANSI DANA ANGGARAN BELANJA
DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

**Navita Khansa Victoria
NIM. 07011381722135**

Konsentrasi Keuangan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Navita Khansa Victoria

NIM : 0711381722135

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Transparansi Dana Anggaran Belanja di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 24 November 2022

pernyataan,



Navita Khansa Victoria
0711381722135

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TRANSPARANSI DANA ANGGARAN BELANJA DI KANTOR
DPD (DEWAN PERWAKILAN DAERAH) SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

Oleh:
NAVITA KHANSA VICTORIA
07011381722135

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Februari 2022

Pembimbing I
Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



Pembimbing II
Zailani Surva Marpaung, S.SOS., MPA
NIP. 198108272009121002



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“Transparansi Dana Anggaran Belanja Di Kantor DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Sumatera Selatan”

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

Navita Khansa Victoria

07011381722135

Pembimbing I

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si

196911191998032001

Tanda Tangan



Tanggal

21 Juli 2012

Pembimbing II

2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

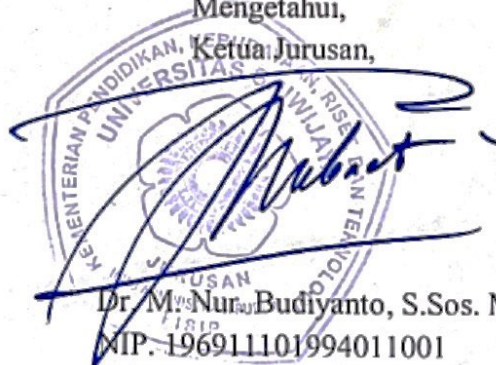
198108272009121002



20 Juli 22

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos. MPA

NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**TRANSPARANSI DANA ANGGARAN BELANJA
DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
SUMATERA SELATAN**

Skripsi

Oleh :

Navita Khansa Victoria

07011381722135

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 28 Juli 2022

Pembimbing :

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
196911191998032001

2. Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA
198108272009121002

Penguji :

1. Dr. Lili Erina, M.Si
196612301992032001

Tanda Tangan



Tanda Tangan



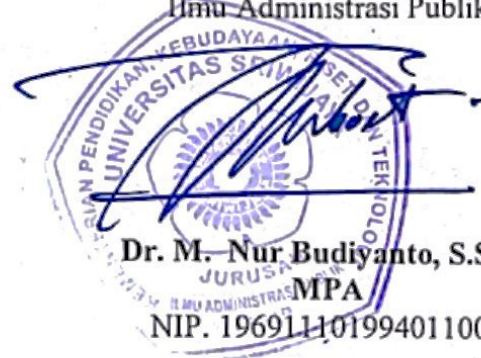
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos.,
MPA
NIP. 196911101994011001.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”
(Q.S. Al Baqarah 286)

Atas Ridha Allah SWT, Skripsi

Ini Saya Persembahkan

Kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Saya dan Kakak dan Adik Kesayangan**
- 2. Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI**
- 3. Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017**
- 4. Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Derajat Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik. Skripsi ini berjudul “Transparansi Dana Anggaran Belanja Di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan”.

Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi, kemudian kedua orang tua sebagai penyemangat terbaik yang tak pernah letih memberikan dukungan secara moral maupun material selama perkuliahan khususnya selama menyusun skripsi ini. Adapun penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE.** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. **Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. **Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang membantu memperlancar proses akademik selama perkuliahan ini.
5. **Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA.** selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberi ilmu pengetahuan dan para staf akademik yang telah membantu segala kepentingan perihal administrasi dan akademik selama masa pendidikan.
8. **Bapak Yuni Samsi Agus, S.H., M.Si.** selaku Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan.
9. **Bapak Sefri Barkah** selaku Staff Ahli DPD Perwakilan Sumatera Selatan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sudah berusaha maksimal dalam penyusunan skripsi ini. Apabila masih ada kekeliruan dalam penulisannya, penulis menerima kritik yang membangun. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

Palembang, Juli 2022

Navita Khansa Victoria

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan. Peneliti menggunakan teori Kristianten (2006 : 73) Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Anggaran belanja pada kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan sendiri menjadi bagian dari APBN sehingga belum otonom. Sehingga pada penelitian ini membuktikan bahwa, Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Pelaksanaan transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan melalui kelengkapan dan akses dokumen sudah memenuhi prinsip keterbukaan, Kejelasan dan kelengkapan informasi tentang pelaksanaan transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan sejalan dengan indikator Transparansi, Keterbukaan Proses pada dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan sejalan dengan indikator Transparansi, hingga Kerangka regulasi pada transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan telah sesuai dengan indikator Transparansi yang digunakan pada penelitian ini. Adapun saran dalam penelitian ini adalah dapat menambah *platform online* maupun langsung agar mempermudah masyarakat mengakses dokumen anggaran, selain itu meski anggaran masih belum otonom, namun masyarakat dapat diikutsertakan dalam kegiatan musyawarah pembangunan atau perencanaan terkait anggaran belanja hingga ke pemanfaatan anggaran, karena masyarakat sangat berperan besar untuk mewujudkan transparansi.

Kata Kunci: Transparansi, Anggaran, Belanja, Kantor, DPD, Dewan Perwakilan Daerah

Pembimbing I



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Pembimbing II



Zailani Surva Marpaung, S.SOS., MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, Juli 2022

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This study aims to determine the transparency of budget funds in the office of the Regional Representative Council (DPD) South Sumatra. The researcher uses the theory by Christian (2006:73). Transparency can be measured through several indicators, namely: document availability and accessibility, information clarity and completeness, process openness, and regulatory framework that ensures transparency. The expenditure budget at the South Sumatra Regional Representative Council (DPD) office itself is part of the APBN so it is not yet autonomous. So that in this study it proves that, Availability and Accessibility of Documents Implementation of transparency of budget funds in the office of the Regional Representatives Council (DPD) South Sumatra through the completeness and access of documents has met the principles of openness, clarity and completeness of information about the implementation of transparency of budget funds in the office of the House of Representatives. Region (DPD) South Sumatra in line with the indicators of Transparency, The openness of the process to budget funds at the South Sumatra Regional Representative Council (DPD) office is in line with the Transparency indicator, so that the regulatory framework on the transparency of budget funds at the South Sumatra Regional Representative Council (DPD) office is in accordance with the Transparency indicators used in this study. The suggestions in this study are to add online or direct platforms to make it easier for the public to access budget documents, in addition, even though the budget is still not autonomous, the community can be involved in development deliberation activities or planning related to the budget to budget utilization, because the community plays a big role. to achieve transparency.

Keywords: *Transparency, Budget, Expenditure, Office, DPD, Dewan Perwakilan Daerah*

Advisor I



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

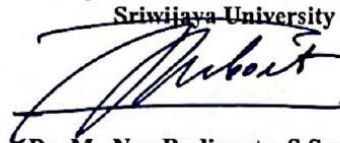
Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, July 2022

**Chairman of The Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University**



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISIONALITAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.x
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Keuangan Negara	9
2. Transparansi	11
3. <i>Disclosure</i> (pengungkapan).....	15
4. Anggaran	18
5. Belanja.....	25
6. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	29
7. Kantor Daerah Dewan Perwakilan Daerah	31
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pemikiran	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Definisi Konsep.....	43
C. Fokus Penelitian	44

D. Jenis dan Sumber Data.....	44
E. Informan Kunci (<i>Key Informant</i>).....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Sistematika Penulisan	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Singkat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).....	49
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).....	50
3. Visi dan Misi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI).....	50
4. Hak dan Kewajiban Anggota DPD RI	51
5. Susunan Organisasi	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi Anggaran Belanja Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020.....	4
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3 Fokus Penelitian.....	44
Tabel 4 Pengadaan penambahan anggaran di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 2 Struktur Organisasi di Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Selatan	52
Gambar 3 Sirkulasi pengadaan anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian	65
Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 1	66
Lampiran 4: Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing 2	69
Lampiran 5: Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	71
Lampiran 6: Matriks Pedoman Wawancara	72
Lampiran 7: Dokumentasi Penelitian	74
Lampiran 8 Hasil Survei	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan menurut Tanjung (2014 : 11). Menurut Mardiasmo (2006 : 18) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Adrianto (2007 : 12) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Berdasarkan pendapat dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa transparansi dapat berupa pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan. Dalam negara demokrasi, "pelaporan keuangan yang transparan" merupakan sesuatu yang dituntut oleh rakyat kepada pemerintahnya. Bahwa pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan transparansi. Tuntutan adanya transparansi membawa dampak terhadap dalam proses pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia. Maka dibutuhkan pemerintah yang transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah dikatakan transparan jika penyelenggaraan pemerintah dapat diakses dan diketahui dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dari

pendapat Regina (2016 : 67) yang berkata masih kurangnya pertanggungjawaban pemerintah pada setiap anggaran dan realisasi yang dicapai pada setiap kegiatan, pemerintah selalu memberi penjelasan kepada masyarakat yang sulit dicermati oleh masyarakat sehingga masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan pemerintah pada kegiatan yang diselenggarakan dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya.

Menurut Foster (2008 : 212) anggaran adalah pernyataan kuantitatif dari suatu rencana kegiatan yang dibuat manajemen untuk periode tertentu dan alat yang membantu mengkoordinasikan hal-hal yang perlu dilakukan guna mengimplementasikan rencana tersebut. Lalu, Munandar (2010 : 1) menjelaskan anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu pendek (periode) tertentu yang akan datang. Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Nafarin (2012 : 19) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Sedangkan pengertian anggaran menurut Haruman (2010 : 6) bahwa anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Pelaksanaan anggaran adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan menurut BPKP (2011 : 56).

Di Indonesia pada awalnya secara resmi digunakan istilah *begrooting* untuk menyatakan pengertian anggaran. Namun sejak proklamasi kemerdekaan, digunakan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terdapat dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 dan dalam perkembangannya ditambahkan kata negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab. APBN menurut Halim (2004), adalah rencana pengeluaran atau belanja juga penerimaan dan pembiayaan belanja suatu negara untuk periode tertentu. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2009), APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenan.

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN agar dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut Bastian (2010) APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftar rencana keuangan yang berisi tentang pendapatan dan pengeluaran negara selama periode tertentu atau biasanya satu tahun. Dimana periode APBN dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Tabel 1 Realisasi Anggaran Belanja Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020

Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
Belanja Keperluan Perkantoran	19.680.000		7.206.000
Konsumsi Kegiatan Penerimaan Delegasi/Aspirasi Masyarakat dan Daerah	10.800.000	4.950.000	5.850.000
Fotocopy	1.680.000	364.000	1.316.000
Koran / Majalah	4.200.000	4.020.000	180.000
Bahan Pendukung Operasional Pemeliharaan	3.000.000	3.140.000	(-140.000)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos			
Ekspedisi	2.400.000	265.007	2.134.993
Belanja Barang Operasional Lainnya	5.400.000		-
Pakaian dan Perlengkapan Satpam	3.000.000	3.000.000	-
Pakaian Kerja Dinas	2.400.000	2.400.000	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7.200.000		118.600
ATK	4.800.000	4.736.400	63.600
Bahan Komputer	2.400.000	2.345.000	55.000
Belanja Langganan Listrik			
Biaya Langganan Listrik	180.000.000	180.000.000	
Belanja Langganan Telepon			

Biaya Langganan Telepon	125.000.000	125.000.000	
Belanja Langganan Air			
PDAM	42.000.000	42.000.000	
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	36.000.000		-
Langganan Jaringan Internet	24.000.000	24.000.000	
Langganan Jaringan Televisi	12.000.000	12.000.000	
Belanja Sewa	143.000.000		-
Sewa Kendaraan Angkutan Barang	8.000.000	-	
Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor DPD RI	35.000.000	-	
Sewa Rumah Dinas 4 Kasubbag Kantor DPD RI	100.000.000	-	
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115.400.000	112.315.500	3.084.500
Pemeliharaan Gedung Kantor	90.000.000	-	89.325.000
*Retribusi Sampah		675.000	
Pemeliharaan Jalanan dan Halaman Parkir	2.200.000	-	2.200.000
Pemeliharaan Taman	2.200.000	-	2.200.000
Pemeliharaan Taman Indoor	4.000.000	-	4.000.000
Maintenance & Repair Mekanikal dan Elektrikal	6.000.000	315.000	5.685.000
Penggantian lampu	5.000.000	-	5.000.000

Penggantian langit-langit ruangan	3.000.000	-	3.000.000
Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	3.000.000	-	3.000.000
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.400.000	39.992.500	6.407.500
Pemeliharaan Sarana/Prasarana/Peralatan (Komputer, Laptop, Printer, CCTV dll)	4.000.000	-	4.000.000
Pemeliharaan AC	8.400.000	23.152.500	(-14.752.500)
Pemeliharaan Lift	3.000.000	-	3.000.000
Operasional Mesin/Generator (Beli mesin pompaair)	1.000.000	450.000	550.000
Bahan Bakar Minyak	28.800.000	28.028.550	771.450
TOTAL	722.480.000	710.727.201	11.752.799

Sumber : Data dari Kepala Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kegiatan yang masih memiliki sisa anggaran pada kegiatan Belanja Keperluan Perkantoran, Kegiatan Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat, Kegiatan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Kegiatan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, karena realisasi pada kegiatan tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran yang sudah ditentukan, selain itu pada kegiatan Belanja Sewa tidak terdapat informasi mengenai realisasi anggaran dan sisa anggaran. Namun, di beberapa kegiatan lainnya terdapat anggaran pendapatan dan realisasi anggaran yang sesuai diantaranya kegiatan Belanja Barang Operasional Lainnya, Kegiatan Belanja Langganan Listrik, Kegiatan Belanja

Langganan Telepon, Kegiatan Belanja Langganan Air, Kegiatan Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya. Dikarenakan beberapa anggaran pada kegiatan masih terdapat sisa, sehingga dana anggaran tersebut dapat dimanfaatkan di beberapa kegiatan lain untuk mengoptimalkan pembangunan pada kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, namun tentunya kegiatan pemanfaatan dana tersebut harus jelas dan sesuai dengan kebutuhan. Berikut observasi yang dilakukan Bersama Kepala Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan, yakni Bapak Yuni Samsi Agus:

“Karena untuk kantor Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sendiri masih dalam lingkup APBN bukan APBD atau belum memiliki otonom sendiri, sehingga untuk seluruh kegiatan yang menyangkut anggaran tentu harus sesuai persetujuan dari pusat terlebih dahulu dan harus sesuai dengan peraturan yang ada, maka untuk pemanfaatan anggaran yang masih memiliki sisa beserta pengajuan belanja diluar APBN harus melalui prosedur yang jelas dan melewati proses yang panjang agar anggaran tersebut disetujui pusat”. (Hasil observasi 29 November 2021)

Berdasarkan observasi diatas membuktikan terdapat prosedur yang panjang dalam pemanfaatan anggaran belanja kantor Dewan Perwakilan Daerah di pusat, sehingga pada tahapan tersebutlah dapat dibuktikan apakah terdapat kejelasan kegiatan, keterbukaan informasi, atau segala hal yang berkaitan dengan transparansi pada anggaran belanja tersebutsehingga adanya suatu penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mendalam dan mendekati kenyataan tentang transparansi anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah oleh sebab itu berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini yaitu seperti apa dan bagaimana Transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Transparansi dana anggaran belanja di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diharapkan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis yakni :

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya konsentrasi Keuangan Negara dan Fiskal dalam memahami Transparansi Dana Anggaran Belanja Di Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi serta sebagai rekomendasi suatu kebijakan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, untuk meningkatkan penyaluran dana anggaran di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan agar dapat disalurkan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Penerbit : BPFU UGM. Yogyakarta.
- Adrianto, Nico. 2007. *Goode-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anggaran, P., Dan, P., & Desa, B. (2016). *Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan*. 7-10.
- Arifin, M. F., & Jamaaluddin, J. (2020). Menentukan Lokasi Usaha Ikan Bakar Bamboo Menggunakan Metode Kualitatif Eksploratif. *Menentukan Lokasi Usaha Ikan Bakar Bamboo Menggunakan Metode Kualitatif Eksploratif*, 1–4.
- Auditya, Halim. (2013). *Akuntansi dan Pengendalian keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN.
- Henri. (2018a). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6 Illahi, T. (2020). *Administrasi Keuangan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/u4efd>
- Jeklin, A. (2016). *Konsep Transparansi dan akuntabilitas*, 1–23.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mandagi, N., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. . (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (Dpkpa) Kabupaten Minahasa Selatan*. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 152–162.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Meriansa, A. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (studi pada Inspektorat dan BPKAD Kota Bandung)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 14–65.
- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2019). *Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi*. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>
- Novitaningrum, B. D. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)*. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 200–210.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). *Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)*. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Sugiyono, 2017:63. (2017). *Pengaruh Kompetensi Karyawan Dan Budaya Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT Telkom Indonesia*. *Repository*, 23–70. <http://repository.unpas.ac.id/30050/5/7>. BAB II.pdf
- Windrawan, P. (2017). *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Studi Tentang Susunan dan Tata Kerja Kantor Daerah DPD*. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta*, 204–224.
- Yunina, F. (2019). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Tengah*. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(1), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>